

LAPORAN AKHIR MAGANG

**ANALISIS PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
INFORMASI OBYEK PAJAK (SISMIOP) SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PATI**



Disusun Oleh

Muhammad Alfian Ananta Nur

Student Number : 19312116

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Di sini saya menyatakan orisinalitas Laporan Magang saya. Saya belum mempresentasikan karya orang lain untuk mendapatkan gelar universitas saya, saya juga belum mempresentasikan kata-kata, ide, atau ungkapan orang lain tanpa pengakuan. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau akibatnya.

Yogyakarta, 08 Februari 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Alfian Ananta Nur

NIM: 19312116

LAPORAN MAGANG

ANALISIS PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK (SISMIOP) SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI

Disusun oleh :

Muhammad Alfian Ananta Nur

Students Number : 19312116

Diperiksa oleh :

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**Analisis Prosedur Penerapan Sistem Informasi Obyek Pajak Sebagai Peningkatan Pelayanan
PBB Pada BPKAD Kabupaten Pati**

Disusun Oleh : MUHAMMAD ALFIAN ANANTA NUR

Nomor Mahasiswa : 19312116

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Penguji : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFPA, CertIPSAS.

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG

Dengan ini, Dosen Pembimbing dan supervisor menyatakan bahwa laporan magang yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Alfian Ananta Nur

NIM : 19312116

Prodi : Akuntansi

Judul : ANALISIS PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK (SISMIOP) SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pada tanggal yang tertera di bawah ini :

Disetujui Oleh :

Pati, 26 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Supervisor



**Yuni Nustini, MAFIS., Ak.,
CA., Ph.D**



Jumadi, S.E

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan laporan tengah magang ini sebagai bentuk aktivitas saya selama magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Penulisan laporan tengah magang ini dilakukan sebagai bentuk proses melaksanakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

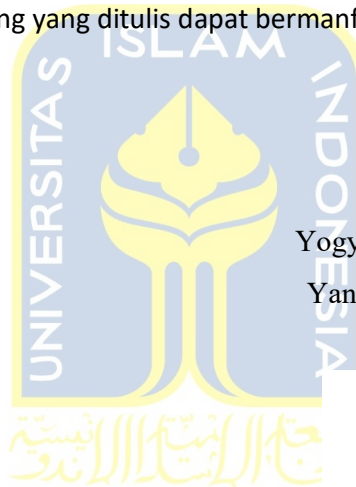
Saya menyadari sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan tengah magang ini. Keberhasilan penyusunan laporan tengah magang ini tidak akan terwujud apabila tanpa ada bantuan, bimbingan, dan motivasi yang tak terhingga nilainya dari berbagai pihak baik material maupun spiritual. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Kedua orang tua saya, Nur Ghufron dan Ummi Hamidah, adik saya Chomisah Zakiya Nur, serta kakek nenek saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan mendoakan penulis tiada henti;
- 2) Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan tengah magang ini;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang telah menerima dan menyediakan tempat serta kesempatan penulis melaksanakan aktivitas magang dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai

keperluan penyusunan laporan akhir magang;

- 4) Sahabat-sahabat seperjuangan, Nicho Kurniawan, Daffa Esyalafi, Fadlan Tinedy, Daffa Aldiansyah, Baiq Nabila, Aulivi Permata, Adira Nisrina dan teman-teman lain yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam penyusunan laporan tengah magang ini;
- 5) Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan tengah magang ini dapat terselesaikan dengan baik;

Dalam pembuatan laporan magang ini masih banyak kekurangan yang penulis lakukan. Karenanya, kritik dan sarap diharapkan sangat diharapkan oleh penulis. Semoga laporan magang yang ditulis dapat bermanfaat.



Yogyakarta, 16 Januari 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Alfian Ananta Nur', is placed below the text 'Yang menyatakan,'.

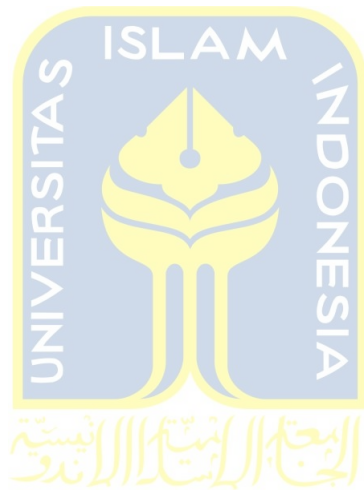
**Muhammad Alfian Ananta
Nur**

NIM: 19312116

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Definisi Pajak	5
2.2 Jenis Pajak	6
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	7
2.4 Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).....	8
2.5 Kajian Terdahulu.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis Penelitian	13
3.2 Sumber dan Data Penelitian	13

3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.4 Teknik Analisis Data	14
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM.....	15
4.1 Profil Instansi	15
4.2 Visi dan Misi	18
4.3 Aplikasi Sistem dalam BPKAD Kabupaten Pati.....	19
4.4 Aktivitas Pelaksanaan Program Magang.....	20
4.5 Ketercapaian Aktivitas Magang	23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
5.1 Pelaksanaan Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Obyek Pajak Pada BPKAD Kabupaten Pati.....	27
5.2 Hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BKPAD Kabupaten Pati	31
5.3 Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati	31
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	33
6.1 Kesimpulan.....	33
6.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah penting untuk mewujudkan tercapainya kualitas hidup yang diinginkan oleh semua bangsa yaitu sejahtera. Adanya harapan untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan pola pikir dan strategi agar dapat mencapai tujuan. Dr. Wetria Fauzi. SH. M. Hum (2019) mengatakan bahwa keinginan untuk mencapai kesejahteraan diakibatkan oleh banyaknya tuntutan dan berubahnya pola pikir untuk mewujudkan kebutuhan hidup yang semakin tidak dapat dikendalikan. Karenanya, disinilah peran pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dengan didukung oleh masyarakatnya.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan untuk pembangunan negara adalah memaksimalkan pajak. Pajak adalah sumber penerimaan paling besar yang didapatkan oleh pemerintah. Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa tipe pajak, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dipungut karena menciptakan manfaat dan hasil atas tanah maupun bangunan yang dimiliki. Dalam lingkup PBB terdapat klasifikasi sasaran pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). Kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan sangat tinggi dan memiliki peran penting dalam terciptanya pembangunan dalam lingkup daerah. Menurut Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H. dan Moch. Iqbal, S.H., M.H. (2020) dalam buku yang berjudul *Hukum Pajak Teori dan Praktik* mengatakan bahwa untuk mendukung terciptanya pembangunan harus disertai dengan pengakuan subjek pajak bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban warga negara dan sadar akan dasar hukum perpajakan untuk mencapai kesejahteraan

bersama. Hal ini telah berjalan seiring adanya pengalihan wewenang dari pemerintah pusat yang kini diambil alih oleh pemerintah daerah dalam aspek pengelolaan PBB-P2 sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD.

Atas pengambilalihan tersebut, segala proses yang berkaitan dengan PBB-P2 dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Bentuk kegiatannya antara lain adalah mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, proses administrasi, pungut pajak, dan pelayanan PBB-P2. Karenanya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan pekerjaannya sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Dibutuhkan adanya faktor pendukung untuk memberikan hasil kerja yang maksimal dalam rencana mengoptimalkan kegiatan pelayanan operasional PBB yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia. Menurut (Prasadja Ricardianto 2018,15) SDM yang berkualitas adalah manusia yang memahami tentang kesadaran akan tujuan organisasi dengan dilandasi ilmu dan tanggung jawab tanpa meninggalkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kerja.

Di lain sisi, Sumber Daya Manusia harus tetap di kolaborasikan dengan adanya teknologi pendukung demi kepuasan pelayanan. Dalam buku Sistem Informasi Manajemen (2021) menurut Yuni Widiastiwi, S.Kom, M.Si. mengatakan bahwa penggunaan sistem dapat memberikan dampak positif pada tingkat kerja yang optimal, efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan di era sekarang. Terciptanya system yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mendukungnya, Dirjen Pajak dan Kemenkeu telah melahirkan suatu sistem pendukung operasional PBB-P2 yaitu SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). Menurutnya, SISMIOP digunakan untuk pengolahan data yang diterima dengan berbasis komputer. Pengolahan data diantaranya yaitu, pendaftaran, pendataan, dan penilaian yang kemudian menghasilkan hasil keluaran salah satu contohnya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Sebelumnya, SISMIOP telah diaplikasikan dan menjadi aspek pendukung dalam pelayanan dan pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah pusat.

Tetapi, adanya pengalihan wewenang menjadikan system ini diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Pengalihan wewenang ini dilakukan karena adanya pengelolaan data yang kurang maksimal akibat update data obyek dan subyek PBB-P2 kurang jelas. Karenanya pemerintah pusat melakukan perbaikan kebijakan atas fakta di lapangan untuk mencapai kesesuaian atas data pajak melalui pemerintah daerah dengan didukung oleh Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Sebagai Sarana Peningkatan Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur penerapan system informasi obyek pajak sebagai sarana peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BKPAD Kabupaten Pati
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis prosedur penerapan system informasi obyek pajak sebagai sarana peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD

Kabupaten Pati

2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati
3. Memberikan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis
 - a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja yang sebenarnya
 - b. Melatih kedisiplinan dan rasa kepercayaan diri dalam mempersiapkan dunia kerja di masa mendatang
 - c. Meningkatkan pengetahuan tentang PBB-P2
 - d. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur system informasi obyek pajak (SISMIOP) pada BPKAD Kabupaten Pati
 - e. Melatih dan memahami cara pendataan pajak melalui SISMIOP
2. Bagi Instansi
 - a. Membantu meningkatkan pelayanan dan penerimaan PBB pada instansi dengan pendataan pajak melalui SISMIOP
 - b. Terjalinnnya hubungan baik antara instansi dengan perguruan tinggi
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di bidang PBB-P2 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Adanya keinginan suatu bangsa untuk menuju kesejahteraan pembangunan nasional dibutuhkan biaya untuk mencapainya. Salah satu cara untuk memperoleh dana untuk pembangunan bangsa adalah melalui pajak. Pajak dapat digunakan sebagai senjata utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Beberapa pandangan para ahli mengenai pajak yang sebenarnya mempunyai arti yang sama, seperti menurut Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam buku yang berjudul *Hukum Pajak Teori dan Praktik* (2020) menjelaskan bahwa pajak menjadi bagian yang harus wajib dipenuhi oleh masyarakat selaku warga negara sesuai dengan peraturan UU, dimana rakyat dituntut untuk membayarnya demi membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan pemerintahan. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah dan warga negaranya dalam mencapai potensi penopang kemajuan ekonomi.

Pajak dilaksanakan berdasarkan perintah UU yang bersifat wajib dan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dimana pemungutan pajak dilakukan untuk membiayai public investmen. Hal itu perlu diperlukan agar memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Negara dan rakyatnya akan sejahtera jika kedua pihak dapat saling mendukung strategi yang dilakukan, salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu. Menurut Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H. dan Moch. Iqbal, S.H., M.H. (2020) dalam buku yang berjudul *Hukum Pajak Teori dan Praktik* juga mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena pembayaran pajak memiliki fungsi antara lain :

1. Sebagai fungsi budgetair, dimana pemerintah dapat mengambil sumber dana dari hasil pemungutan pajak untuk kas negara dan pembiayaan operasional negara

2. Sebagai Fungsi Regulasi, dimana adanya pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur maupun menjalankan kebijakan untuk memajukan perekonomian dan mengatasi masalah social
3. Fungsi Sosial/Demokrasi, merupakan pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kapasitas seseorang dalam membayar pajak

2.2 Jenis Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis pajak yang berbeda antara lain (Diaz Priantara, 2012) :

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Pajak langsung, dimana pemungutan pajak dilakukan secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan seperti misalnya pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung, dimana pemungutan dapat dilakukan kepada siapapun ketika WP bersangkutan mengalihakn beban pajak kepada pihak lain seperti misalnya PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
2. Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Subjektif, focus dari pemungutan pajak pada jenis ini adalah subyek pajaknya, dimana petugas pajak menentukan siapa subyek pajak kemudian baru menentukan obyek pajaknya seperti misalnya WP ialah PPh
 - b. Pajak Obyektif, focus dari pemungutan pajak pada jenis ini adalah obyek pajaknya, dimana petugas pajak menentukan obyek pajak kemudian baru menentukan subyek pajaknya seperti misalnya Pajak Bumi dan Bangunan
3. Berdasarkan Wewenang Pemungutan
 - a. Pajak Pusat, dimana pajak jenis ini dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Kemenkeu dan Dirjen Pajak seperti misalnya PPN dan PPh
 - b. Pajak Daerah, dimana pajak ini dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah daerah (Kabupaten/kota) seperti misalnya mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan lainnya

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat dua obyek dalam pajak bumi dan bangunan yaitu perdesaan dan perkotaan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PBB-P2 merupakan pajak yang di pungut berdasarkan obyek pajak yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan tetapi obyek pajaknya bukan merupakan wilayah perkebunan, tambang, dan hutan

b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh Subyek pajak kecuali kawasan perkebunan, hutan, dan tambang. Dimana terdapat obyek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- Jalan Tol, Jalan yang berada di Kawasan Hotel, kawasan industry, dan lainnya
- Pagar mewah
- Taman mewah
- Kolam renang
- Sport center
- Galangan kapal dermaga
- Tempat penampungan air dan sejenisnya
- Tanah/ladang
- Sawah
- Kebun

Dalam PBB terdapat beberapa obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 pasal 3 yaitu obyek pajak yang :

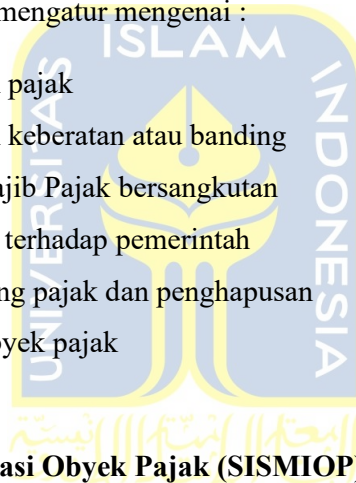
- Digunakan sebagai pelayanan kepentingan yang bersifat umum dan obyek yang tidak dijadikan sebagai meraup keuntungan seperti misalnya, tempat ibadah, Kesehatan, dan Pendidikan
- Digunakan sebagai tempat pemakaman, tempat sejarah purba

- Digunakan sebagai hutan wisata, taman nasional, dan hutan lindung
- Digunakan sebagai tempat untuk kepentingan politik seperti, perwakilan diplomatic, konsulat
- Digunakan sebagai tempat jalannya proses pemerintahan misalnya badan atau organisasi internasional

c. Dasar Hukum Pemungutan

Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana di dalamnya mengatur tentang pedoman cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan Obyek PBB. Selain itu, hukum pajak juga mengatur mengenai :

- SOP penagihan pajak
- SOP pengajuan keberatan atau banding
- Subyek dan Wajib Pajak bersangkutan
- Kewajiban WP terhadap pemerintah
- Munculnya utang pajak dan penghapusan
- Menentukan obyek pajak



2.4 Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)

Sejarah SISMIOP

Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak merupakan sistem yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi atas adanya pengalihan wewenang PBB-P2 (pedesaan dan perkotaan) kepada pemerintah daerah pada tahun 2009, maka sistem ini juga dialihkan untuk membantu mendukung proses operasional kerja PBB-P2 di PEMDA. Sistem ini bekerja untuk membantu proses administrasi dan pelayanan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pedesaan dan perkotaan. Operasional kerja SISMIOP pada BPKAD baru mulai pada tahun 2013 yang artinya sebelumnya cara kerja yang dilakukan BPKAD Pati secara manual.

1. Pengertian SISMIOP

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2017 mengungkapkan bahwa SISMIOP adalah sebuah system pendukung yang terintegrasi dimana di dalamnya menjalankan operasional yang berkaitan dengan proses administrasi dalam sebuah instansi yang berfokus mengelola PBB. Karenanya, SISMIOP diharapkan mampu membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan pelayanan, sebagai pengambil keputusan, catatan dan evaluasi kerja.

2. Kegiatan dalam SISMIOP

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor kep-533/Pj/2000, menyebutkan terdapat kegiatan dalam pelaksanaan SISMIOP, yaitu :

a. Pendaftaran OP dan SP

b. Pendataan

Proses pendataan Obyek dan Subyek pajak yang ditujukan untuk merekam atau memutakhirkan data PBB yang ada dalam SPOP agar data menjadi akurat dan ter-update.

c. Penilaian

Proses penilaian terhadap harga obyek pajak misalnya bumi dan bahan bangunan yang harus dilakukan penyesuaian atas harga sekarang. Karenanya maka, setiap ada perubahan harga harus ada penilaian ulang secara keseluruhan maupun individu atas penyesuaian harga masa kini melalui SISMIOP. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prosesnya ketika melakukan penilaian massal, antara lain ketika terdapat perubahan atas data data ini :

- Update data harga bahan atau upah serta hitung DBKP standar dan material
- Data fasilitas terbaru
- Update DBKB Non standart
- Update NIR

Maka, pengelola PBB diwajibkan melakukan penilaian ulang yang kemudian dapat dilakukan pencetakan atas laporan hasil penilaian

a. Pemberian identitas OP atau NOP

- b. Perekaman data meliputi : perekaman ZNT dan DBKB serta perekaman SPOP
- c. Pencetakan keluaran meliputi : SPPT, STTS, dan DHKP
- d. Pemantauan pembayaran atau penerimaan

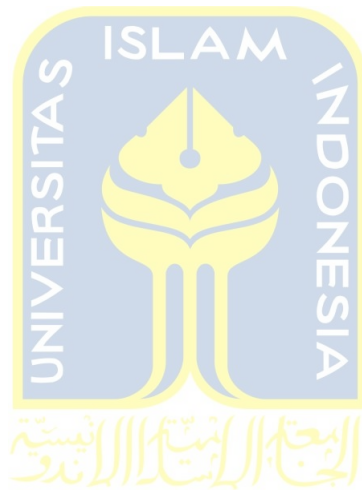
2.5 Kajian Terdahulu

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Obyek	Temuan
1.	Hatauruk, Uly Arta (2020)	Dispenda Kabupaten Pasuruan	Hasil kajian menyatakan bahwa pengimplementasian SISMIOIP pada obyek penelitian berpengaruh pada optimalisasi pengolahan data yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dilakukan secara manual. Adapun lainnya, adanya system tersebut dapat mengurangi tingkat kecurangan
2.	Su'fatul Ulum Mutatun Afia dan Cecep Wahyu Hoerudin (2020)	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SISMIOIP berdampak positif pada efektivitas pemungutan pajak dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan system ini. Selain itu prosedur yang digunakan juga telah sesuai dengan SOP.

No	Penulis	Obyek	Temuan
3.	Alousius Karisma Yogatma Tuwanakotta dan Astri Fitria (2021)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya SISMIOP telah dilaksanakan sesuai dengan standart Dirjen Pajak meskipun membutuhkan penyesuaian, selain itu SISMIOP menjadi peran penting bagi terciptanya peningkatan PBB di daerah tersebut melalui adanya hasil keluaran berupa SPPT dari system tersebut yang dapat mendukung kinerja pemungutan pajak
4.	Muhammad Ridwan Caesar dan Asep Rahmat Andi (2022)	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan SISMIOP bertujuan untuk tujuan pelayanan public. Selain itu pada tingkat kinerja di lingkungan tersebut berhasil menyelenggarakan system tersebut dengan cukup optimal dengan didukungnya SDM yang mahir.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian diatas membahas tentang bagaimana pengaruh Pelaksanaan System Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) di beberapa lokasi yang berbeda. Dimana dalam obyek penelitian diatas merupakan instansi pemerintah daerah yang berfokus pada penerimaan pendapatan daerah. Selain itu metode yang digunakan dalam kajian sebelumnya berbeda-beda.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Menurut (Kriyantono, 2014) Penelitian ini merupakan metode penelitian yang menganalisis dan melukiskan peristiwa yang terjadi di lapangan guna menghasilkan data yang bersifat non angka, sesuai fakta yang ada sehingga dapat mengetahui situasi dengan sebenar-benarnya. Dalam konsepnya, penelitian ini tergolong penelitian yang sederhana. Meskipun demikian, peneliti diwajibkan melakukan analisis secara kritis dan detail terhadap fokus utama penelitian atas dasar data yang di dapat dari observasi langsung maupun tidak langsung. Peneliti berharap pemilihan metode penelitian ini dapat mendukung keberhasilan dalam melakukan riset secara jelas atas fakta di lapangan.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber dan data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Danang Sunyoto (2020) data primer dan sekunder yaitu :

- 1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari obyek penelitian atau sumbernya langsung yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dan dinilai memiliki data akurat
- 2) Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk membantu proses penelitian tetapi bukan berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dengan didukungnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka peneliti menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data, meliputi :

1) Wawancara

Menurut Raco (2018) Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan fakta dan mencari tahu permasalahan yang terjadi di lapangan melalui tanya jawab responden atau narasumber. Dalam proses wawancara, teknik ini dapat membantu peneliti untuk merangkum, menganalisis, dan berpikir kritis atas pendapat yang disampaikan oleh narasumber.

2) Pengumpulan Dokumen Instansi

Pengumpulan data diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Menurut Rohiyatun et al (2020) untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan adanya ketekunan dan analisis peneliti secara kompleks berdasarkan focus penelitian yang dikaji. Salah satu caranya adalah mengumpulkan data secara langsung kepada obyek penelitian sebenarnya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dianggap mampu memberikan informasi tentang instansi.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam memperoleh data. Menurut Moleong (2005:4) dengan digunakannya metode deskriptif kualitatif, peneliti akan mendapatkan data secara lisan, akan tetapi peneliti harus dapat mengolah data yang diterima untuk mencapai kesesuaian dan fenomena apa yang terjadi berkaitan dengan penerapan system informasi obyek pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

4.1 Profil Instansi



Gambar 1. Gedung BPKAD Kabupaten Pati

Nama Instansi : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD)

Alamat : Jalan Dokter Setia Budi, Pati Kidul, Pati, Pati
Wetan/Dosoman,
Pati Wetan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59114

Telepon : (0295)381931

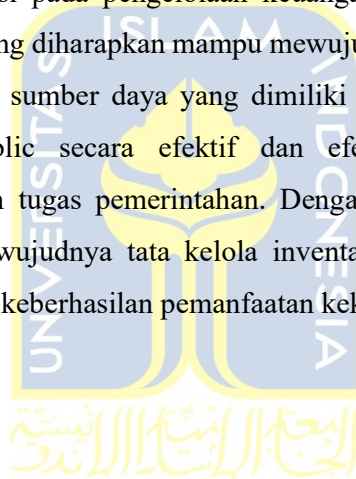
Website : <https://bpkad.patikab.go.id/>

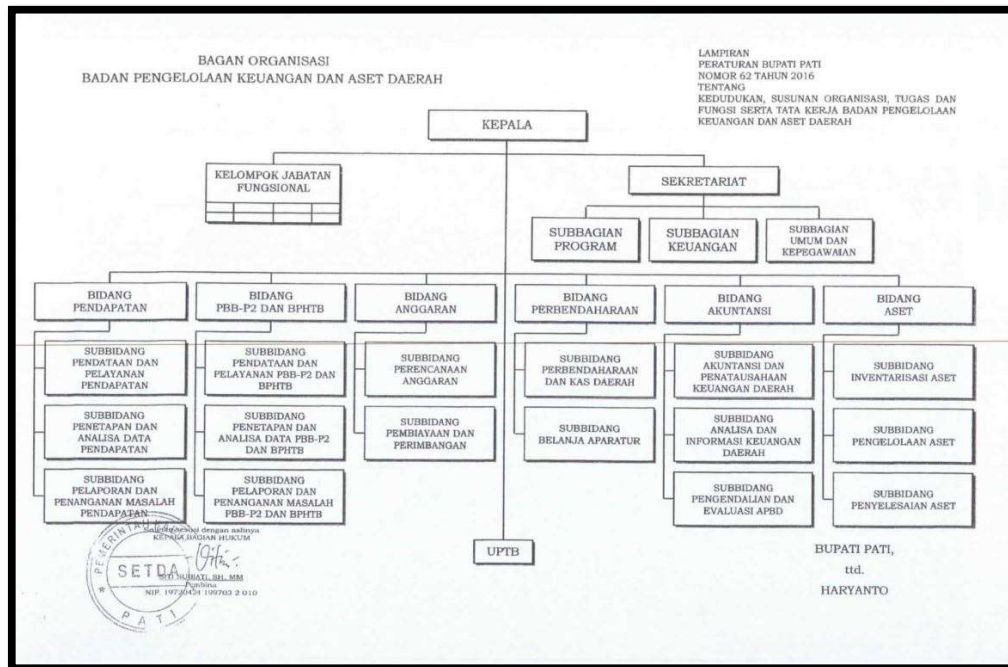
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dibangun tahun 2007 dan mulai beroperasi tanggal 3 Maret Tahun 2009. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 11 Tahun 2008 (Bab XI pasal 29) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati berlokasi di Jalan Setiabudi No. 34 dan merupakan sebuah institusi pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah dalam bidang Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPKAD Kabupaten Pati berorientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi asset daerah yang diharapkan mampu mewujudkan pencapaian optimalisasi potensi-potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Pati, memberikan pelayanan public secara efektif dan efisien dan akuntabel dalam penyelenggaran tugas pemerintahan. Dengan adanya hal tersebut, dapat menunjang terwujudnya tata kelola inventarisasi aset daerah yang baik sebagai bentuk keberhasilan pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki.





Gambar 2. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pati

Struktur organisasi badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program,
 2. Subbagian Keuangan,
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan,
 2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan,
 3. Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah Pendapatan
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :
 1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB,
 2. Subbidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB,
 3. Subbidang Pelaporan dan Penanganan Masalah PBB dan BPHTB

- e. Bidang Anggaran, terdiri dari
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran,
 2. Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,
 2. Subbidang Belanja Aparatur
- g. Subbidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah,
 2. Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah,
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4.2 Visi dan Misi

➤ Visi

Meningkatkan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien

➤ Misi

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;
- b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan;
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis;
- e. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel

4.3 Aplikasi Sistem dalam BPKAD Kabupaten Pati

- Aplikasi Pajak Daerah
 - E-PBB adalah sistem informasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan
 - Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung pelayanan BPHTB. Aplikasi BPHTB dapat terintegrasi dengan Bank, dan BPN. Adanya sistem BPHTB Online memudahkan PPAT/Notaris untuk mendaftar dan melaporkan BPHTB
 - PAJAK EGO adalah media pelaporan pajak daerah melalui system teknologi berbasis online
 - Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangannya
 - SIDARA adalah system informasi pengendalian Menara
 - SATRIO PASAR adalah aplikasi retribusi pajak daerah Kabupaten Pati
 - SISMIOP adalah suatu system yang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan PBB-P2 dengan metode komputer berupa pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, dan hasil keluaran berupa SPPT
- Aplikasi Pengelolaan Keuangan
 - Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya

- Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
- Aplikasi Pengelolaan Aset Daerah
 - SIMDA BMD merupakan program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA – BMD) yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan aset pemerintah daerah.
 - SI BAPER merupakan aplikasi penatausahaan dan pelaporan Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu melanjutkan penatausahaan dan pelaporan Barang Persediaan pada perangkat daerah secara online guna mendapatkan laporan Barang Persediaan yang tertib dan akuntabel.

4.4 Aktivitas Pelaksanaan Program Magang

Sebagai pelaksana dalam Program Magang Tugas Akhir ini adalah :

Nama : Muhammad Alfian Ananta Nur

NIM : 19312116

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia

Semester : VII (tujuh)

Rencana Pelaksanaan : 12 September – 12 Desember 2022 (3 bulan)

Bagian Magang : PBB-P2 dan BPHTB

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 12 September 2022 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2022. Magang ini awalnya dilaksanakan 6 hari kerja sebelum ada perubahan kebijakan dari pemerintah daerah. Perubahan kebijakan jam operasional kantor mulai diubah pada tanggal 10 Oktober 2022 yang berjalan pada hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB s&d 15.30 WIB. Dihari pertama magang, pada tanggal 12 September 2022 peserta magang mulai masuk hadir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang berlokasi di Jalan Dokter Setia Budi, Pati Kidul, Pati, Pati Wetan/Dosoman, Pati Wetan, Kec.Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59119. Dihari tersebut saya bertemu kabid akuntansi yaitu Ibu Isti untuk dijelaskan mulai dari aturan berpakaian selama mengikuti magang di BPKAD yaitu berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Selain itu, dijelaskan pula teknis pelaksanaan magang, dan gambaran umum ketika magang di BPKAD Pati. Selanjutnya peserta magang diarahkan ke bidang umum sekretariat dan bertemu dengan Pak Totok untuk pembagian job desk pada magang yang akan dilakukan. Dalam penjelasannya saya ditugaskan di bidang PBB-P2 dan BPHTB. Setelahnya sebelum menjalankan tugas sesuai job desk peserta magang di interview oleh Ibu Siwi selaku kasubag pendataan dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. Dalam interview tersebut peserta magang memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan rencana program magang dan durasi waktu magang yang akan dijalankan.

Di bulan pertama yaitu September peserta magang mendapat penjelasan dan gambaran tugas bagian PBB-P2 dan BPHTB oleh supervisor yaitu Pak Jumadi. Dimana dalam tugasnya yaitu melakukan pendataan dan pelayanan, penetapan PBB-P2 dan BPHTB, dan pelaporan dan penanganan masalah PBB dan BPHTB. Di Minggu pertama, sudah ada distribusi tugas kepada peserta magang yaitu mendata surat disposisi laporan dari bagian pelayanan pajak untuk ditandatangani oleh kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB yaitu Pak Sugiarto. Surat tersebut terdiri atas beberapa laporan berkaitan dengan pelayanan pajak yaitu tentang permohonan mutasi PBB, penghapusan data BPHTB, permohonan pengurangan pajak BPHTB, permohonan mediasi pajak BPHTB, penghapusan obyek pajak, pembuatan obyek pajak baru, pembetulan, dan lainnya. Dari beberapa surat laporan diatas, terdapat

beberapa laporan yang nantinya akan di input data nya melalui system yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Peserta magang dibimbing untuk mulai melakukan pendataan terhadap permohonan laporan mutasi pajak bumi dan bangunan melalui system teknologi. Proses pendataan terkait mutasi pajak dilakukan dengan aplikasi pendukung yaitu system manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP). Disini peserta magang harus mencocokkan dan memperbarui data obyek pajak yang akan di mutasi melalui system tersebut sesuai dengan surat permohonan laporan mutasi yang diterima. Oleh karenanya, peserta magang tertarik untuk mengambil topik dengan judul **“Analisis Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) Sebagai Sarana Peningkatan Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati”**. Setelah judul tersebut di konfirmasi oleh dosen pembimbing dan instansi terkait, peserta magang mengumpulkan data terkait dari instansi untuk memperoleh informasi sebagai referensi dalam membantu Menyusun proposal magang dan laporan magang.

Pada bulan selanjutnya November, peserta magang ditugaskan untuk melakukan pemisahan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOP untuk diarsipkan berdasarkan kecamatan agar berkas mudah dicari dalam satu wilayah yang sama yang selanjutnya akan dialihkan untuk proses pembuatan/pecah peta atas tanah atau bangunan yang dimutasi. Selain tugas tersebut, pada minggu kedua peserta magang diajak verifikasi lapangan yaitu berkaitan dengan peninjauan langsung obyek pajak yang akan di mutasi. Peserta magang ditugaskan untuk menyesuaikan gambar yang tersedia di laporan dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Selain itu, tugas lapangan dilakukan untuk mencari informasi berkaitan dengan obyek pajak guna mendapatkan kebenaran atas pengajuan laporan. Peninjauan secara langsung dilakukan ketika terdapat ada kejanggalan atas jual beli tanah seperti ketidaksesuaian harga tanah sebenarnya. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke lapangan, peserta magang juga ditugaskan untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), hal itu digunakan sebagai izin resmi pegawai ketika melakukan verifikasi lapangan.

Di bulan terakhir, peserta magang mulai melakukan pembuatan video, edit video TA Magang, wawancara untuk memperoleh tambahan informasi data tanpa meninggalkan tugas-tugas yang diberikan, mulai dari penginputan pemutakhiran pajak melalui SISMIOP, pengarsipan, dan entry data pembayaran.

4.5 Ketercapaian Aktivitas Magang

No	Waktu	Permasalahan	Aktivitas	Hasil
1	12 September 2022	Belum memiliki informasi dan gambaran terkait teknis pelaksanaan magang, job desk dan aturan yang ada di BPKAD Kabupaten Pati	Penjelasan berkaitan dengan informasi teknis, pembagian job desk dan aturan selama proses pelaksanaan magang di BPKAD Kabupaten Pati dan interview pelaksanaan magang	Memahami dan mengetahui aturan-aturan dan informasi berkaitan dengan job desk yang akan dilakukan oleh peserta magang selama proses magang di BPKAD Kabupaten Pati
2	13-17 September 2021	Belum paham tentang konsep kerja yang dilakukan di bidang PBB-P2 dan BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan konsep dan tugas PBB-P2 dan BPHTB oleh supervisor 	Peserta magang perlahan mulai mengetahui tentang gambaran umum terkait dengan tugas bidang PBB-P2 dan BPHTB
3	19-24 September 2022	Sudah ada distribusi tugas meskipun belum signifikan dan belum paham	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Diberikan penjelasan berkaitan tugas yaitu melakukan pendataan surat disposisi laporan dari bagian pelayanan 	Mengetahui jenis dan isi laporan pengajuan surat
4	26Sept- 01 Oktober 2022	Tidak memahami distribusi tugas yang diberikan berkaitan tentang	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Diberikan penjelasan dan dibimbing untuk mulai 	Peserta magang mulai dapat memahami distribusi tugas terkait dengan pendataan melalui aplikasi SISMIOP

No	Waktu	Permasalahan	Aktivitas	Hasil
		penginputan data	melakukan proses pendataan atas laporan mutasi melalui aplikasi SISMIOP, - Peserta magang masih melakukan pengarsipan surat disposisi	
5	03-08 Oktober 2022	Belum menemukan topik mengenai laporan magang	- Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Mulai melakukan pencarian informasi dan pengamatan kegiatan yang dilakukan di BPKAD Pati, - Peserta magang ditugaskan untuk melakukan pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOP	Mendapatkan topik laporan atas pelaksanaan program magang
6	10-14 Oktober 2022	Tidak paham mengenai surat pengajuan laporan mutasi yang diterima	- Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Diajak untuk ikut tugas verifikasi lapangan mengenai peninjauan obyek pajak yang akan di mutasi/dipecah, - Peserta magang melakukan pengarsipan surat disposisi - Peserta magang ditugaskan untuk membuat SPPD	- Mengetahui fakta obyek pajak sebenarnya setelah melakukan verifikasi lapangan atas pengajuan laporan yang diterima - Peserta magang mendapatkan informasi terkait nilai jual obyek pajak sesuai dengan kondisi obyek pajak
7	17-21 Oktober 2022	Tidak memahami Distribusi tugas entry data melalui E-BPHTB	- Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - Penugasan entry data pembayaran melalui E-BPHTB - Penjelasan dan tutorial pengerjaan entry data E-BPHTB - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas	-peserta magang memahami tentang cara pembayaran pajak dan entry data melalui E-BPHTB

No	Waktu	Permasalahan	Aktivitas	Hasil
			laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOP	
8	24-28 Oktober 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOP - melakukan entry pembayaran berkas SSPD 	Sudah mulai memahami proses kerja
9	31Okt - 04 November 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati, - Diajak untuk ikut tugas verifikasi lapangan mengenai peninjauan obyek pajak yang akan di mutasi/dipecah, - Membantu untuk menginput nomor subyek pajak untuk proses mediasi pajak -pembuatan SSPD 	
10	07-11 November 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - melakukan penginputan pemuakhiran dan perekaman atas pengajuan (mutasi) atau balik nama OP yang diterima - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOP 	
11	14-18 November 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - melakukan entry pembayaran berkas SSPD melalui E-BPHTB 	

No	Waktu	Permasalahan	Aktivitas	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penginputan pemutakhiran dan perekaman atas pengajuan (mutasi) atau balik nama OP yang diterima - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOIP 	
12	21-25 November 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - mulai melakukan take video magang - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOIP 	
13	28-02 Desember 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - melakukan penginputan pemutakhiran dan perekaman atas pengajuan (mutasi) atau balik nama OP yang diterima - Pemisahan dan pengarsipan terhadap berkas-berkas laporan mutasi yang telah di input dari aplikasi SISMIOIP - melakukan entry pembayaran berkas SSPD melalui E-BPHTB 	
14	05-12 Desember 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Apel Pagi yang dilakukan setiap hari oleh semua karyawan BPKAD Pati - take video magang - edit video magang - tanya jawab untuk memperoleh data 	

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Obyek Pajak Pada BPKAD Kabupaten Pati

SISMIOP digunakan untuk menginput data/berkas Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). Aplikasi ini berkaitan dengan PBB P2 yaitu ketika terjadi pengajuan mutasi, pemutakhiran, penghapusan, atau pembuatan objek pajak baru. Kegiatan pelaksanaan SISMIOP di BPKAD Pati adalah melakukan pendataan terkait dengan obyek pajak dan subyek pajak PBB-P2. Dalam prosesnya dilakukan melalui system computer dengan tujuan dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data akurat yang sesuai dengan kondisi obyek dan subyek pajak yang sekarang. Menurut wawancara yang dilakukan SISMIOP sangat mendukung efisiensi kinerja dalam bidang PBB-P2.

Dalam pelaksanaannya, BPKAD Pati melakukan pendataan SPOP (surat pemberitahuan obyek pajak) dan LSPOP (lampiran surat pemberitahuan obyek pajak). Proses pendataan SPOP diantaranya :

- Perekaman data OP bumi
- Pemutakhiran data OP bumi
- Penghapusan data OP bumi

Sedangkan proses-proses LSPOP, terdiri :

- Pemasukan data bangunan
- Pemubaruan data bangunan
- Penghapusan data bangunan
- Penilaian bangunan secara individu

Langkah-langkah dalam proses entry SPOP/LSPOP dalam SISMIOP :

1). Pada gambar ini merupakan menu awal aplikasi SISMIOP



2). Tahap selanjutnya yaitu klik menu pendataan dan pilih pendataan obyek pajak, selanjutnya input SPOP dan LSPOP



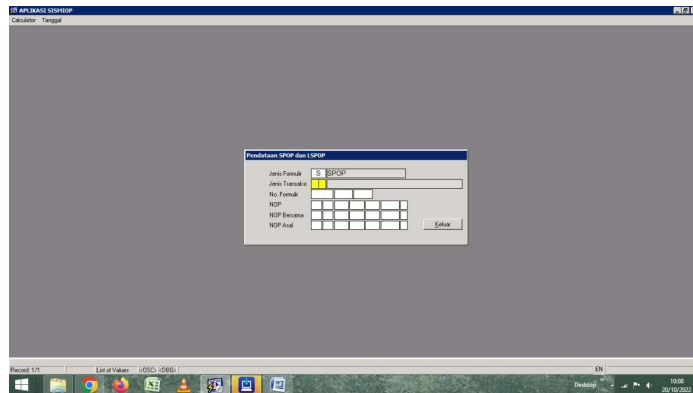
3). Berikut adalah bagian Input SPOP/LSPOP. Isi sesuai jenis aktivitas pendataan, dimana SPOP untuk pengisian obyek tanah dan LSPOP untuk pengisian obyek bangunan. SPOP dengan kode S dan LSPOP dengan kode L. Sedangkan jenis aktivitas/transaksi/kode khusus SPOP :

Angka 11 = perekaman data OP

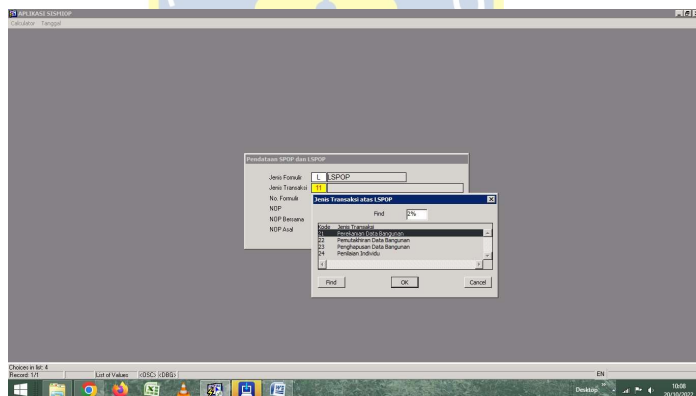
Angka 12 = pemutakhiran data OP

Angka 13 = penghapusan data OP

Angka 14 = penghapusan OP bersama



Jenis transaksi atau aktivitas pendataan LSPOP :



5.2 Hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan karyawan BPKAD Kabupaten Pati dalam mengoperasikan aplikasi SISMIOP terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya :

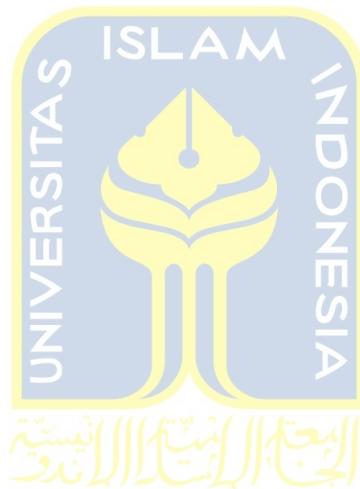
- 1) Dari segi kualitas teknologi,
 - Hardware : computer yang kurang mendukung mengakibatkan eror dalam proses operasional yang sedang berjalan
 - Jaringan : masih seringkali terdapat masalah server down ketika pemrosesan berjalan, sehingga berakibat pada operasional kerja yang tertunda. Selain itu, WIFI yang tiba-tiba mati juga berpengaruh dalam kinerja SISMIOP
- 2) Dari segi sumber daya, banyaknya pengajuan yang diterima mengakibatkan sumber daya manusianya kewalahan dalam proses penginputan. Hanya terdapat 4 karyawan yang dapat mengoperasikan input data SISMIOP padahal ada target pencapaian yang harus dipenuhi

5.3 Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan system informasi obyek pajak dalam melakukan peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi, oleh karenanya penulis memberikan saran dalam mengatasi kendala yang dialami, yakni :

- 1) Upaya yang harus dilakukan BPKAD dalam peningkatan kualitas IT/system informasi adalah dengan rutin melakukan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian server oleh IT professional sehingga system selalu terjaga dan aman. Upaya ini ditujukan agar operasional system dapat berjalan dengan baik
- 2) Upaya yang dilakukan BPKAD agar karyawan tidak kewalahan dalam proses penginputan yaitu :

- Memungkinkan untuk merubah operasional kerja PBB-P2 agar WP bisa mengakses dan menginput datanya sendiri melalui SISMIOP
- Dengan mencari sumber daya manusia yang professional atau terlatih dalam mengoperasikan SISMIOP
- BPKAD dapat memanfaatkan karyawan yang sudah ada dengan memberikan pelatihan khusus agar dapat membantu dalam input data melalui SISMIOP



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

SISMIOP merupakan salah satu sistem informasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Pati yang memberikan upaya dalam mendukung perlakuan operasional kerja yang efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan meskipun SISMIOP memiliki sisi positif yaitu dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja, tetapi dapat disimpulkan juga pengimplementasian SISMIOP pada BPKAD Kabupaten Pati masih memiliki beberapa kendala seperti ketidaksiapan dalam aspek kualitas IT yang mendukung, dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berakibat pada kewalahan dalam proses pencapaian target.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait hambatan-hambatan yang ada, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

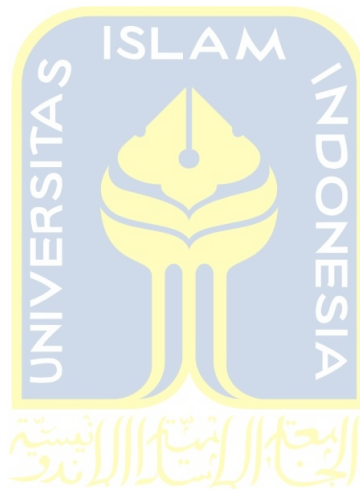
- (1) Memungkinkan untuk merubah operasional kerja PBB-P2 agar WP bisa mengakses dan menginput datanya sendiri melalui SISMIOP sehingga karyawan tidak mengalami kewalahan
- (2) Perekrutan IT professional untuk menjaga keamanan dan mendukung kualitas system sesuai standart operasional,
- (3) Meningkatkan SDM dan memberikan pelatihan khusus dalam pengoperasian SISMIOP kepada seluruh karyawan pada bidang PBB-P2 misalnya dengan memberikan buku panduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alouisius Karisma Yogatama Tuwanakott, A. F. (2021). Evaluasi Sismiop Sebagai Tata Kelola Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 10, 2-22. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3809>
- DAERAH, P. K. (2018). Operator Console/SISMIOP. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Operating-Concole.pdf>
- Dasvil. (2019). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Chandra Karya Sukses. Retrieved from <http://repositori.buddhidharma.ac.id/391/>
- Dr. Khalimi, S. S. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktis*. AURA.
- Huauruk, U. A. (2020). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berbasis SISMIOP dan SIMPADU di Kabupaten Pasuruan*. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/17735/>
- Hum, D. W. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Retrieved from <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf>
- KEMENKEU, D. J. (n.d.). *UU Tahun 2009 tentang PDRD*. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Kriyantono, N. T. (2014). Pola Komunikasi Pembangunan Terkait Pengelolaan Program Inovasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat.92-106. Retrieved from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/1940/1750>
- Mohamad Ridwan, Y. W. (2021). *Sistem Informasi Manajemen*. Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from https://books.google.com/books/about/SISTEM_INFORMASI_MANAJEMEN.html?id=2edFEAAAQBAJ
- Muhammad Ridwan Caesar, A. R. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. 49-62.

Prasadja Ricardianto (2018:15), R. A. (2022). Retrieved from <http://repository.unas.ac.id/5528/3/BAB%20II.pdf>

Su'fatulUlum Mutatun Afia, C. W. (2020). Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 2, 99-109. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/9387/4531>



LAMPIRAN



MUHAMMAD ALFIAN ANANTA NUR

Mahasiswa Akuntansi

PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia
(2019-sekarang)

Program Studi Sarjana Akuntansi,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

IPK : 3.43

KEMAMPUAN

- Bermotivasi tinggi, disiplin, dan jujur
- Siap belajar dan mencari pengalaman di dunia kerja
- Microsoft Office (word,excel,powerpoint,access)
- Audit Command Language/ ACL

INFORMASI KONTAK

 muhammadalfian74@gmail.com
19312116@students.uii.ac.id

 081225838604

 Plaosan RT 02/02 Cluwak (59157),
Pati Jawa Tengah

PENGALAMAN

Februari - Juli 2021

Course on introduction to SAP (system, Application, and Product) S/4HANA with Global Bike Inc.

Program pelatihan tersebut diadakan oleh Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dimana saya belajar tentang bagaimana untuk mengelola proses bisnis secara real time, memberikan kejelasan, dan menyajikan nilai bisnis dengan melalui sistem teknologi

Agustus 2021

Mengikuti kompetisi MonsoonSIM/simulasi bisnis Independence League 2021

Kompetisi tersebut diadakan oleh Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dimana MonsoonSIM dapat bermanfaat bagi saya untuk melatih bagaimana mengelola dan tim work dalam menjalankan sebuah perusahaan dan bersaing dengan perusahaan lain secara virtual berbasis ERP (Enterprise Resource Planning).

Lampiran 1 : Curriculum Vitae Muhammad Alfian Ananta Nur



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Setiabudi No. 34 Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381931
Faksimile : (0295) 383552

Website: <http://bpkad.patikab.go.id>
E-mail : bpkad@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/2790/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARTO, S.H., M.M.
NIP : 19660413 198603 1 008
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati.

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : M. ALFIAN ANANTA NUR
NIM : 19312116
Program Studi : S1-AKUNTANSI
Fakultas : FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang dimulai pada tanggal 12 September 2022 s.d. 12 Desember 2022. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pati
Sekretaris


* SUWARTO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660413 198603 1 008

Lampiran 2 : surat keterangan selesai magang